

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu negara berkembang yang sedang menghadapi berbagai masalah kependudukan yaitu Indonesia. Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang sedang dihadapi Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa fenomena kemiskinan masih sulit dipecahkan.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia, mulai dari memberikan bantuan langsung ke masyarakat hingga mengadakan program yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Sebagai upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan, maka pada tahun 1998 dirancang Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Namun mulai tahun 2007 berubah menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan atau disingkat menjadi PNPM Mandiri Pedesaan. Program PNPM Mandiri Pedesaan dalam melaksanakan programnya tidak langsung ke masyarakat, tetapi dibantu oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) ataupun Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM). BKM ataupun LKM adalah sebuah wadah yang dibentuk untuk membangun kembali ikatan sosial dan solidaritas sosial sesama warga masyarakat agar mampu mengatasi kemiskinan secara mandiri dengan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel.

BKM/LKM dalam melaksanakan programnya dibantu oleh tiga unit, yaitu Unit Pengelolaan Keuangan (UPK), Unit Pengelola Lingkungan (UPL), dan Unit Pengelola Sosial (UPS). Setiap unit memiliki tugas masing-masing. Tugas utama Unit Pengelola Keuangan (UPK) yaitu menyalurkan bantuan dana melalui program pinjaman bergulir yang akan dipinjamkan kepada masyarakat yang berguna sebagai stimulus agar masyarakat dapat mengembangkan usahanya atau membuat usaha baru dengan menggunakan dana pinjaman tersebut. UPK sangat berperan penting bagi BKM/LKM sehingga sangat diharapkan keberlangsungannya.

Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam menguasai teknologi sangat mempengaruhi pencapaian efisiensi dan efektifitas kinerja, khususnya pada bagian keuangan. UPK Palbapang sudah menggunakan komputer untuk membantu proses kegiatan, tetapi komputer belum digunakan dengan optimal, karena dalam proses pembuatan laporan masih menggunakan Microsoft Excel. Meskipun sudah menggunakan Microsoft Excel tetapi banyak resiko yang terjadi seperti potensi rawan *entry* salah ketik atau terhapus rumus transaksi, data kurang akurat sehingga dibutuhkan ketelitian tinggi untuk mengolah data, harus paham formula atau rumus dalam Microsoft Excel, tidak ada history data jika terjadi perubahan data, dan penyusunan laporan dibutuhkan waktu yang lama.

Untuk meminimalkan terjadinya permasalahan ini maka dibuat aplikasi keuangan untuk mengolah data yang dapat dilakukan dengan cepat, tepat dan akurat sehingga tidak membutuhkan waktu lama dan mempermudah pengurus dalam pengolahan data pinjaman.

Oleh karena itu penulis dalam penyusunan tugas akhir ini akan membuat program aplikasi terkomputerisasi dengan judul **“SISTEM INFORMASI PINJAMAN PADA UPK PALBAPANG”**.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk membuat suatu sistem informasi pengolahan data pinjaman pada UPK Palbapang. Selain itu juga sebagai acuan dan bahan pertimbangan untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem kerja yang sedang berjalan di UPK Palbapang.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, dapat diidentifikasi masalah bagaimana membuat sistem pencatatan pinjaman untuk membantu proses pencatatan pelaporan.

1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah pada Aplikasi Sistem Informasi Pinjaman pada UPK Palbapang adalah sebagai berikut:

1. Aplikasi ini membuat sistem informasi pencatatan pinjaman pada UPK Palbapang
2. Aplikasi ini menghitung jumlah pinjaman dan angsuran pinjaman setiap anggota
3. Laporan yang dihasilkan dari sistem ini adalah daftar users, daftar anggota, daftar jenis pinjaman, daftar bunga, laporan pengajuan per periode, laporan pinjaman per periode, laporan angsuran per periode, dan laporan jatuh tempo per periode
4. Membuat kartu piutang dan bukti pembayaran
5. Keterlambatan dalam membayar angsuran akan dikenakan denda
6. Pembayaran denda dihitung mulai dari satu hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran
7. Anggota yang berhak mengajukan pinjaman yaitu masyarakat Kelurahan Palbapang.